

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi sesuai dengan pasal 1 UU No 17 Tahun 2012. Koperasi memiliki karakteristik yang sesuai dalam mengelola berbagai potensi di Indonesia secara optimal. Koperasi memiliki peran yang sangat penting dan diwujudkan melalui kegiatan usaha secara kolektif yang melibatkan partisipasi oleh masyarakat dalam kegiatannya. Dalam UU No. 17 Tahun 2012, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dilakukan dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran atau kegiatan lainnya. Hadirnya koperasi diharapkan dapat membangkitkan perekonomian Indonesia

mengingat Pandemi COVID-19 yang dewasa ini membuat perekonomian Indonesia anjlok. Selain itu, koperasi juga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal, barang-barang, maupun saran investasi yang mana keuntungan koperasi akan dibagikan kepada anggota pada akhir tahun yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi serba usaha dalam menyediakan pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari – hari anggota juga masyarakat sekitarnya.

Anggota koperasi merupakan pemilik dari suatu organisasi koperasi tentunya harus mendapatkan informasi terkait keberadaan koperasi yang dapat dilihat dalam laporan pengurus yang berisi laporan keuangan maupun laporan tentang kegiatan usaha koperasi yang biasanya diberikan kepada para anggota koperasi pada setiap rapat anggota. Dalam menjalankan organisasi, suatu badan usaha harus memilikii catatan keuangan maupun non-keuangan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mana dalam sebuah koperasi, pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan kepada seluruh anggota yang biasanya dilaksanakan dalam rapat anggota tahunan (RAT).

Laporan keuangan merupakan catatan keuangan yang memperlihatkan kinerja dan kondisi suatu organisasi yang menghasilkan informasi perusahaan tersebut. Apabila kualitas laporan keuangan meningkat tentunya informasi keuangan yang dihasilkan dapat menjadi suatu landasan dalam sebuah pengambilan keputusan. Seperti yang sudah diketahui dalam penyajian laporan keuangan, lembaga koperasi masih banyak yang belum bisa

menerapkan laporan keuangan yang berdasar pada standar akuntansi keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan membuat laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah menetapkan bahwa koperasi dianjurkan untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) daripada SAK UMUM untuk memudahkan koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan pihak eksternal serta internal dapat mengetahui informasi yang diperoleh selama satu periode dengan SHU yang diperoleh sumber daya ekonomi yang optimal. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan penerapan secara fleksibilitas dan diharapkan memberikan kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Standar pelaporan keuangan tersebut telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebelum dialihkan dari PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian sebagai bentuk konvergensi ke *Internasional Financial Reporting Standard* (IFRS) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No. 12/Per/M.UKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sector rill, bahwa koperasi sector rill yang tidak memiliki akuntabilitas public maka diwajibkan laporan keuangannya mengacu kepada SAK ETAP. Seiring

dengan perkembangan jaman diimbangi dengan usaha koperasi yang terus meningkat, tentunya pengelolaan secara professional terhadap lembaga koperasi sangat dibutuhkan khususnya dalam bidang keuangan.

Dilansir dari (Pemerintah Provinsi Bali, 2019) Bapak Wakil Gubernur Bali Tjok Ace menyampaikan bahwa lembaga koperasi nantinya mampu menjadi wadah dan suatu lembaga dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam perputaran perekonomian masyarakat serta lingkungannya. Sejalan dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Bali, dilansir dari media Kompasiana (Utami 2021). Pemerintah daerah provinsi Bali khususnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Koperasi yaitu Diklat KSP/USP se-Bali Angkatan I yang mana dalam pelaksanaan diklat tersebut disampaikan bahwa Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang berkaitan dengan kondisi kerja dan perubahan posisi keuangan koperasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi.

Koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dikelola bersama dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Di dalam menjalankan suatu usaha bisnis sangat diperlukan adanya laporan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari koperasi kepada anggota yang disampaikan dalam rapat anggota tahunan. Laporan keuangan dibutuhkan dalam pembuatan keputusan srategis untuk mengembangkan koperasi. Laporan keuangan

bersifat sangat krusial sehingga dalam penyusunan laporan keuangan koperasi diberlakukan suatu standar yang bernama standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas (SAK ETAP) untuk menjaga kualitas informasi pada laporan keuangan tersebut. Standar ini cocok digunakan untuk koperasi karena pembuatannya lebih mudah dan sederhana namun informasi yang disajikan tetap bermutu. SAK ETAP disusun guna memudahkan koperasi dalam membuat laporan keuangan yang lebih sederhana.

Banyak keuntungan yang diberikan dari penerapan SAK-ETAP dalam laporan keuangan seperti adanya penyederhanaan PSAK yang dilakukan oleh SAK-ETAP yang memudahkan bisnis pemula dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan disusunnya laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP maka akan memudahkan pelaku bisnis untuk mendapatkan kredit dari pihak eksternal dan mendapat opini audit. Selain itu dapat digunakan dalam beberapa tahun ke depan, standar ini didesain secara dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini sehingga dapat digunakan hingga beberapa tahun kedepan dan bisnis ukm maupun koperasi tidak perlu bingung mencari standar pelaporan keuangan yang mudah dan efisien (Khairunnisa, 2018). Namun kenyataannya banyak perusahaan dan pelaku bisnis yang tidak dapat menerapkan SAK-ETAP dengan baik (Sari, 2018). Hal ini justru menjadi pertanyaan mengapa sudah diberikan laporan yang sederhana tetapi tidak diterapkan. Dalam penerapannya masih banyak koperasi dalam membuat laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP yang ditetapkan.

SAK ETAP merupakan turunan dari PSAK yang sebagai bentuk penyederhanaan dari PSAK. SAK ETAP ini memberikan kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan PSAK yang memiliki ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menerapkan SAK ETAP yaitu kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan, kemungkinan mendapat pinjaman yang lebih besar, dapat digunakan dalam beberapa tahun kedepan yang artinya SAK ETAP didesain secara dinamis dan mengikuti perkembangan zaman saat ini, hal ini membuat standar keuangan bisa digunakan dalam beberapa tahun kedepan.

SAK ETAP disusun secara sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi pengguna yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas public (ETAP). Karakteristik dari standar ini yaitu tidak mengacu ke SAK umum, mayoritas menggunakan Hhistorical cost concepts, hanya mengatur transaksi umum yang dilakukan, pengaturan lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum, alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana, adanya penyederhanaan pengakuan dan pengukuran. Peneliti tertarik untuk menggunakan SAK ETAP karena standar ini dapat dipahami yaitu kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah relevan, suatu informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna.

Yang ketiga adalah materialitas, informasi dipandang material jika kesalahan dalam mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang ke empat adalah keandalan dimana informasi yang disajikan harus andal, bebas dari kesalahan material dan disajikan secara jujur. Dapat dibandingkan, pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, dan Yang ke lima adalah substansi mengungguli bentuk artinya transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Pertimbangan sehat, artinya ada pertimbangan unsur kehati-hatian sehingga aset tidak disajikan terlalu tinggi atau rendah. Kelengkapan, agar dapat diandalkan informasi laporan keuangan harus lengkap.

Peneliti tidak memilih sak emkm karena koperasi ini sudah tergolong koperasi yang besar dan laporan keuangan yang disajikan lebih banyak yang berpedoman pada SAK ETAP. Untuk sak emkm tersebut lebih cocok digunakan untuk umkm karena rendahnya umkm yang menyusun laporan keuangan. Kebaruan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti mengambil lokasi penelitian sebuah koperasi yang sudah berkembang dan ada sektor rill yang membidangi usaha yang dikembangkan dari koperasi tersebut. Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya ini bisa bangkit dari masalah yang menjerit dan dikabarkan bangkrut dalam beberapa tahun yang lalu. Dari penelitian terdahulu

penelitiannya dilakukan di koperasi atau KUD yang sedang baik saja tidak ada masalah yang krusial sebelumnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati, 2017) menyatakan bahwa KUD Karya Agung belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat hanya tiga yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dalam laporan neraca yang dibuat juga belum sepenuhnya menerapkan SAK-ETAP hal ini dibuktikan pada pos kewajiban, KUD Karya Agung belum mengklasifikasikannya menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang, koperasi hanya menyajikan kewajiban lancar saja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khairunnisa, 2015) yang menyatakan bahwa koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Samudera Nusantara Pelabuhan Banjarmasin dimana laporan yang dibuat hanya neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas. Pada laporan perhitungan hasil usaha, koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Samudera Nusantara Pelabuhan Banjarmasin tidak memisahkan penjualan untuk anggota dan non anggota, koperasi ini juga belum menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas anggota sebagai bagian dari komponen laporan keuangan untuk koperasi. Kendala yang dihadapi oleh beberapa koperasi sehingga tidak menerapkan SAK-ETAP dalam laporan keuangan perlu dikaji sehingga ditemukan solusi untuk menangani masalah tersebut.

Masalah yang terjadi pada beberapa koperasi apakah terjadi juga pada koperasi Mulia Sejahtera.

Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya adalah salah satu koperasi yang berlokasi di Kabupaten Tabanan. Koperasi ini merupakan yang bergerak dalam sector riil. Sektor riil merupakan koperasi tersebut usaha yang dilakukan bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Jika koperasi lainnya kebanyakan hanyamemberikan pinjaman kepada nasabah, namun pada koperasi pemasaran mulia sejahtera jaya dalam sektor riil tersebut memiliki berbagai bidang usaha diantaranya adalah penjualan obat pertanian, usaha penjualan kebuuhan rumah tangga, produksi beras, penjualan pakan ternak. Kebanyakan jika koperasi serba usaha hanya menjual produk saja, namun di dalam sektor riil tersebut juga mendampingi perkembangan usaha dari anggotanya serta memberikan masukan juga untuk kemajuan usahanya. Disinilah keunikan dari koperasi sektor riil yang tujuannya untuk mesejahterakan anggota dan memberdayakan kemampuan anggota agar bisa mengelola usaha dengan baik, tidak hanya untuk mencari keuntungan saja.

Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera merupakan pengembangan usaha di sektor riil yaitu mengadopsi sektor pertanian dan olahan dan juga menysasar pengembangan usaha dari produk herbal sehingga pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi koperasi dengan berputarnya dana dari sektor kredit. Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya ini gencar untuk bergerak di

koperasi sektor riil, melakukan sosialisasi para anggota koperasi yang sehari-harinya berkarya di bidang pertanian. Tujuan dilakukan sosialisasi ini agar setelah koperasi sektor riil berdiri anggota sudah mengenal anggota lainnya dan merasakan manfaat untuk mendukung usaha pertanian mereka. Keunikan Melansir dari baliexpress.jawapos.com pada tahun 2016 Koperasi Mulia Sejahtera diberitakan bangkut dan kasus kebangkrutannya telah dilaporkan ke Polres Tabanan pada maret 2016 oleh nasabahnya. Kanit II Reskrim Polres Tabanan Ipda Nyoman Muliarta menjelaskan “ dua kali kita undang ketua koperasi tidak hadir, karena situasi Covid-19 sempat sepi, sehingga kita belum dapat memberikan keterangan dari ketuanya”. Pihak kepolisian sebelumnya sudah mengumpulkan informasi dari dua orang karyawan koperasi, satu orang nasabah dan empat orang kolektor. Termasuk meminta keterangan dari Dinas Koperasi Tabanan. Berdasarkan keterangan yang didapat semuanya mengarah kepada ketua koperasi. Kasus penggelapan dana nasabah ini oleh koperasi Mulia Sejahtera mencuat pada tahun 2016 yang kantornya berpindah-pindah. Total ada Rp 840 juta uang nasabah yang digelapkan, dimana sebagian besar nasabah berasal dari desa Belumbang, kecamatan Kerambitan Tabanan. Setelah dilaporkan pada tanggal 19 maret 2016 silam, kepolisian tidak memiliki anggaran untuk menyewa auditor independen atau akuntan publik untuk mengaudit kerugian nasabah, karena korbannya merupakan pihak swasta maka biaya untuk menyewa auditor dibebankan kepada nasabah. Walaupun jumlahnya tidak sedikit yaitu 30 juta, para nasabah tetap berusaha

mengumpulkan uang untuk menyewa auditor. Namun hingga kini masih belum jelas kelanjutan dari kasus tersebut.

Melihat dari pernah adanya kasus yang menyangkut dari koperasi Mulia Sejahtera sangat diperlukan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK-ETAP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada nasabah dan juga pihak eksternal untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi Mulia Sejahtera. Keterbukaan laporan keuangan akan mempersulit ketua koperasi untuk melakukan penggelapan dana nasabah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ade Lita Lestari (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun KPRI Keluarga Kabupaten Batu Bara terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, dan KPRI Keluarga Kabupaten Batu Bara belum melakukan penerapan SAK ETAP secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan karena tidak menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan dan penyusunan Laporan Arus Kas tidak diklasifikasikan menurut aktifitasnya yang berdasarkan SAK ETAP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mudjiyono & Iswahyuni, 2020) memaparkan bahwa Laporan keuangan yang dibuat oleh pegawai KPRI “Manfaat” LPMP Jawa Tengah masih belum sesuai dengan SAK-ETAP yang dipedomkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR 04/Per/M.KUKM/VII/2012. Penyajian Laporan Keuangan masih sederhana dan terbatas pada Neraca dan

Laporan Rugi Laba terklasifikasi. Hal ini terjadi karena para pengguna laporan keuangan yang mana pengguna tersebut adalah para anggota koperasi pada KPRI “Manfaat” LPMP Jawa Tengah enggan menerima laporan yang terlalu kompleks dan lebih cenderung keinginan menerima laporan yang lebih sederhana tanpa adanya kendala pada saat dilaksanakannya RAT. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam pengembangan koperasi karena kurangnya pemahaman terkait dengan akuntansi dan keuangan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih mendalam bagaimana penerapan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh koperasi Mulia Sejahtera. Apakah sudah sesuai dengan SAK- ETAP atau tidak karena laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam suatu lembaga atau usaha khususnya untuk lembaga koperasi mengingat keberlanjutan usaha yang diperoleh suatu lembaga itu sendiri. Sangat penting untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan sekaligus mengetahui alur kas masuk dan keluar agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian informasi, pemberian informasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**”

Dalam Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Sektor Rill (Studi Kasus: Koperasi Mulia Sejahtera)”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya belum menyusun Laporan Arus Kas dan Perubahan Ekuitas
2. Arus Kas pada Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya tidak diklasifikasikan menurut aktifitas koperasi, aktifitas investasi dan aktifitas pendanaan

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar lebih focus terhadap permasalahan penyajian laporan keuangan dan penerapan Standar Akuntans Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyajian Laporan Keuangan pada Sektor Rill Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya?

2. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Sektor Rill Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Sektor Rill Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Sektor Rill Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya Sektor Rill Tabanan

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta memperluas wawasan terkait dengan penerapan sistem akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dalam penyusunan dari laporan keuangan koperasi. peneliti nantinya akan menginformasikan terkait

pencatatan laporan keuangan dan penerapan SAK ETAP pada Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya yang mana koperasi tersebut bergerak dalam sector riil. Hasil Penelitian nantinya akan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dalam penelitian yang sejenis khususnya penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi Koperasi Pemasaran Mulia Sejahtera Jaya

Bagi koperasi Mulia Sejahtera penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh Koperasi Mulia Sejahtera terkait dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai pad prosedur standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan sehingga dapat digunakan dalam sebuah pengambilan keputusan.

3. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Manfaat adanya penelitian ini bisa menjadi tambahan sumber kajian kepustakaan bagi para peneliti keepannya yang ingin mencari sumber referensi dan memberikan kontribusi.